

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Kesadaran Politik di Kalangan Generasi Muda

I W. Dresti Yasa*, D. B. Sanjaya, I N. Suastika

Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No.11, Singaraja, Bali, 81116, Indonesia

*Penulis korespondensi, email: wayandresti5@gmail.com

doi: 10.17977/um065.v5.i6.2025.10

Riwayat artikel

Diajukan: 19 Mei 2025

Direvisi: 29 Mei 2025

Diterima: 30 Mei 2025

Diterbitkan: 14 Juni 2025

Kata kunci

Kesadaran politik

Nilai lokal

Pendidikan kewarganegaraan

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik generasi muda melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PKn dalam menumbuhkan kesadaran politik siswa, tantangan implementasinya di lapangan, serta strategi penguatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, khususnya di Kabupaten Karangasem. Metode penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan *library research*. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran PKn di Karangasem masih bersifat normatif dan kurang mengaitkan materi dengan realitas politik lokal. Tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya pendekatan pembelajaran aktif, kurangnya integrasi nilai lokal, minimnya akses terhadap media pembelajaran yang menarik, serta rendahnya pelibatan siswa dalam aktivitas politik simulasional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan seperti integrasi nilai-nilai lokal ke dalam materi ajar, pengembangan model pembelajaran berbasis masalah, pelatihan guru dalam pendidikan politik, serta kolaborasi antara sekolah, KPU, dan pemerintah desa. Dengan pendekatan yang reflektif dan berbasis kearifan lokal, PKn dapat difungsikan sebagai wahana membangun kesadaran politik sejak dini secara lebih efektif.

1. Pendahuluan

Kesadaran politik generasi muda merupakan elemen vital dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini menjadi modal bagi keberlanjutan dan kesehatan demokrasi suatu bangsa. Di era globalisasi yang serba cepat dan kompleks ini, di mana informasi mengalir tanpa batas dan tantangan sosial-politik semakin dinamis, peran serta aktif serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi krusial. Generasi muda yang sadar politik tidak hanya mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi, tetapi juga memiliki kemampuan bernalar kritis untuk menganalisis isu-isu publik, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Tanpa kesadaran politik yang memadai, potensi apatisme dan ketidakpedulian terhadap isu-isu kebangsaan dapat mengikis fondasi demokrasi dari dalam.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan strategis sebagai instrumen formal untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Sebagai mata pelajaran yang dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, PKn tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan teoritis tentang sistem pemerintahan, tetapi lebih jauh, berupaya membangun karakter kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Melalui PKn, peserta didik dibekali dengan pemahaman akan konstitusi, hak asasi manusia, serta mekanisme partisipasi dalam kehidupan bernegara, sehingga diharapkan mereka mampu menjadi bagian integral dari sistem demokrasi. Melalui PKn, siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi dan toleransi, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Devi et al., 2024). Namun, efektivitas PKn dalam menumbuhkan kesadaran politik masih menjadi pertanyaan, terutama ketika pembelajaran cenderung bersifat teoritis serta kurang kontekstual dan kurang melibatkan siswa dalam diskusi isu-isu politik aktual maupun kegiatan praktik kewarganegaraan di lingkungan mereka..

Namun, di berbagai daerah, termasuk kabupaten Karangasem, Bali terdapat indikasi rendahnya partisipasi politik di kalangan pemuda. Fenomena ini tercermin dari minimnya keterlibatan mereka dalam proses pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Di Kabupaten Karangasem, sejumlah studi dan observasi bersama Bupati Karangasem (2023) menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang konsep dasar politik dan demokrasi masih lemah. Banyak siswa tidak mengetahui bagaimana proses pemilu berlangsung, siapa saja pemangku kepentingan dalam pemerintah daerah, atau bagaimana menanggapi isu-isu publik secara konstruktif. Di sisi lain, kuatnya arus informasi melalui media sosial belum diimbangi dengan literasi politik yang memadai, sehingga sebagian generasi muda justru menjadi mudah terpengaruh oleh *hoaks* atau propaganda politik yang menyesatkan.

Pada sisi potensi lokal, di Karangasem terdapat potensi kearifan lokal untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan tradisi budaya dalam pembelajaran PKn. Nilai-nilai seperti musyawarah desa, gotong royong, dan

partisipasi dalam *banjar* (lembaga komunitas tradisional Bali) merupakan manifestasi nyata dari praktik demokrasi dan tanggung jawab sosial yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran PKn. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkaya materi ajar dan memberikan konteks yang lebih relevan bagi siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diinternalisasi. Terdapat kearifan lokal berupa tradisi *Gebug Ende* di Desa Seraya, yang merupakan simbol keberanian dan solidaritas, dapat dijadikan sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Namun, pemanfaatan kearifan lokal dalam pendidikan formal masih terbatas.

Studi kasus di beberapa satuan pendidikan di Karangasem menunjukkan PKn belum dimaksimalkan sebagai media pembentuk karakter politik (Disdikpora Karangasem, 2024). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan konteks lokal. Misalnya, kegiatan pembelajaran jarang melibatkan simulasi pemilu, kurangnya diskusi tentang isu-isu politik lokal atau partisipasi dalam kegiatan masyarakat menyebabkan siswa merasa bahwa politik adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi ini mendorong perlunya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik generasi muda, khususnya di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan kebutuhan dan urgensi latar belakang, maka penting untuk mengevaluasi dan memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik generasi muda di Karangasem, serta pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal, metode pembelajaran yang interaktif, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur (*library research*) sebagai tulang punggung utama, yang diperkuat dengan observasi lapangan dan wawancara untuk memberikan konteks empiris pada temuan literatur. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, peran, dan efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik generasi muda, khususnya di Kabupaten Karangasem, berdasarkan teori-teori, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur seperti buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, artikel pendidikan, dokumen kebijakan pemerintah, serta data-data dari instansi resmi seperti KPU, Dinas Pendidikan, dan lembaga pendidikan terkait. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kerangka konseptual mengenai pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik, sekaligus melihat bagaimana penerapannya dalam konteks lokal, yaitu di Kabupaten Karangasem.

Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan kriteria seleksi literatur yang ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber seperti jurnal penelitian bereputasi Google Scholar, DOAJ, Publish n Perish serta dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2025) untuk memastikan aktualitas informasi. Literasi yang dipilih harus secara eksplisit membahas tentang PKn, kesadaran politik, karakter, peran generasi muda, serta mencakup konteks pendidikan dasar atau lokal jika memungkinkan, terutama yang terkait dengan isu-isu demokrasi dan partisipasi. Teknik analisis data dilakukan secara analisis tematik dari seluruh literatur yang terseleksi diidentifikasi konsep-konsep kunci dan tema-tema dominan terkait peran PKn, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan kesadaran politik. Selanjutnya, dilakukan sintesis naratif, merangkum informasi, membandingkan, dan menganalisis pandangan untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Diperkuat dari temuan dari observasi lapangan dan wawancara untuk mengkonfirmasi atau memberikan ilustrasi konkret terhadap pola-pola yang ditemukan dalam literatur, sehingga analisis menjadi lebih kuat dan relevan dengan konteks empiris yang terjadi di daerah Karangasem Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, ditemukan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan peran PKn dalam membentuk kesadaran politik generasi muda, khususnya dalam konteks Kabupaten Karangasem. Temuan ini dikaji berdasarkan tiga fokus utama peran PKn, tantangan implementasi, dan strategi penguatan.

3.1. Potensi Konsep Pembangunan Kesadaran Politik Siswa Karangasem

Berdasarkan studi kasus di lapangan, konsep kesadaran politik yang dibutuhkan pada generasi muda usia siswa adalah efikasi politik. Efektivitas PKn dalam membangun kesadaran politik generasi muda di Karangasem sangat dipengaruhi oleh tingkat *efikasi politik* siswa. Efikasi politik merujuk pada keyakinan individu bahwa mereka mampu memahami dan mempengaruhi sistem politik. Dalam konteks Karangasem, rendahnya efikasi politik tercermin dari kurangnya pemahaman siswa tentang proses politik lokal, seperti mekanisme musyawarah desa atau peran *banjar* dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, siswa merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak dan enggan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu dirancang untuk meningkatkan efikasi politik siswa melalui pemberian pengetahuan yang relevan tentang sistem politik lokal, pelatihan keterampilan partisipasi, dan kesempatan untuk mempraktikkan pengaruh politik mereka dalam lingkup sekolah dan komunitas (Diskominfo Kab. Karangasem, 2023).

Kepercayaan politik juga menjadi faktor krusial dalam membentuk kesadaran politik generasi muda di Karangasem. Kepercayaan politik mencakup keyakinan terhadap kejujuran, kompetensi, dan responsivitas institusi dan aktor politik. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap politik sebagai sesuatu yang "kotor" dan penuh konflik dapat mengurangi kepercayaan politik siswa terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Minimnya pengalaman siswa dalam praktik demokrasi yang transparan dan akuntabel, baik di sekolah maupun di masyarakat, juga dapat memperburuk kecenderungan ini. Untuk mengatasi hal ini, pembelajaran PKn perlu menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan, serta memberikan contoh-contoh praktik baik demokrasi dari konteks lokal maupun nasional.

Selain efikasi dan kepercayaan politik, *orientasi kewarganegaraan* generasi muda di Karangasem perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran PKn. Orientasi kewarganegaraan mencakup nilai-nilai, sikap, dan disposisi yang mendukung partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa pembelajaran PKn di Karangasem perlu melampaui sekadar penanaman pengetahuan tentang hak dan kewajiban, dan lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, toleransi, kepedulian sosial, dan kemauan untuk berdialog dan berkolaborasi. Integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan tradisi *ngejot* dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan orientasi kewarganegaraan yang kuat dan relevan dengan konteks budaya siswa.

Berdasarkan temuan observasi, terdapat potensi nilai lokal Kabupaten Karangasem yang dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran politik generasi muda. Tradisi musyawarah desa, sebagai contoh, memiliki paralel yang signifikan dengan konsep *deliberative democracy*. Integrasi tradisi musyawarah desa ke dalam pembelajaran PKn secara efektif berfungsi sebagai jembatan *konkret* yang menjelaskan mengapa *deliberative democracy* sangat penting dan bagaimana mekanisme partisipasi yang ideal bekerja dalam praktik nyata. Musyawarah desa menyediakan konteks yang familier dan dapat diakses secara langsung oleh siswa, sehingga konsep abstrak tentang dialog, argumentasi rasional, penghormatan perbedaan, dan pencarian konsensus menjadi lebih mudah divisualisasikan dan diinternalisasi. Anak-anak yang sejak dini terpapar dan terlibat dalam simulasi atau kajian musyawarah desa, secara implisit belajar bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada individu, melainkan terdistribusi melalui deliberasi kolektif. Implementasi efektivitas dari potensi ini dilakukan dengan merancang skenario musyawarah sederhana yang merefleksikan isu-isu sekolah atau komunitas lokal, di mana siswa diminta untuk menyampaikan ide, mendengarkan argumen teman, menimbang berbagai opsi, dan mencapai kesepakatan bersama. Proses ini secara langsung melatih keterampilan *civic skills* seperti komunikasi efektif, resolusi konflik, dan berpikir kritis, yang merupakan pilar penting dalam teori kewarganegaraan demokratis. Dengan demikian, musyawarah desa tidak hanya memperkenalkan siswa pada bentuk demokrasi yang lebih luas, tetapi juga menumbuhkan disposisi kewarganegaraan berupa toleransi, empati, dan tanggung jawab partisipatif yang berkelanjutan (Aminuddin & Yulianti, 2021), mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas memilih, tetapi juga aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Selain musyawarah *banjar*, terdapat tradisi gotong royong di Karangasem yang juga berpotensi besar dalam menumbuhkan semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Gotong royong, yang menekankan pada kerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama, mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan kontribusi aktif dalam komunitas. Nilai ini relevan dengan konsep *civic responsibility* dalam demokrasi, yang menekankan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum (Fadillah, 2022). Dalam pembelajaran PKn, contoh-contoh konkret dari tradisi gotong royong, seperti pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial di banjar, dapat digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana partisipasi aktif dalam masyarakat dapat menciptakan perubahan positif.

Potensi keluhuran adat Karangasem, yang mencakup nilai-nilai etika, moral, dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi, dapat menjadi landasan dalam membentuk karakter politik yang berintegritas (Kemenag Kab. Karangasem, 2021). Nilai-nilai seperti kejujuran, kesantunan, dan penghormatan terhadap otoritas yang sah, yang sering kali ditekankan dalam adat, sangat penting dalam membangun budaya politik yang sehat. Dalam pembelajaran PKn, nilai-nilai luhur ini dapat diintegrasikan dalam pembahasan tentang etika politik, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan pencegahan korupsi. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami prinsip-prinsip demokrasi secara teoritis, tetapi juga internalisasi nilai-nilai moral yang mendasari praktik demokrasi yang baik.

Dengan mengkontekstualisasikan nilai-nilai lokal Karangasem seperti musyawarah desa, gotong royong, dan keluhuran adat dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi universal, pembelajaran PKn dapat menjadi lebih relevan, bermakna, dan efektif dalam membentuk kesadaran politik generasi muda. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman siswa tentang demokrasi, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur. Selain itu, integrasi nilai lokal dalam PKn dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, membantu generasi muda untuk menavigasi tantangan global tanpa kehilangan akar budaya mereka.

3.2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Politik

Pendekatan umum dalam literatur di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa PKn dapat berperan sebagai *vehicle* atau sarana pembentukan karakter politik sejak dini. Melalui pembelajaran yang mengintegrasikan konteks lokal, seperti praktik budaya politik Bali, studi kasus tentang Pilkada di Karangasem, atau diskusi tentang pembangunan desa, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih relevan dan kritis terhadap realitas politik di sekitarnya. Pembelajaran PKn yang menyentuh aspek partisipatif misalnya simulasi pemilu, studi kasus lokal, diskusi kebijakan publik telah terbukti meningkatkan kesadaran dan keterlibatan siswa dalam isu-isu politik (Labetubun et al., 2021). Namun, pembelajaran PKn di Karangasem cenderung masih bersifat normatif dan berorientasi pada hafalan konsep-konsep dasar, tanpa disertai penerapan yang menyentuh langsung pengalaman kontekstual siswa yang berkaitan dengan kehidupan politik di sekitarnya.

Hasil observasi dari beberapa satuan didik di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa materi PKn lebih banyak disampaikan secara konvensional, melalui metode ceramah dan penugasan tertulis. Hanya sedikit guru yang mengaitkan materi dengan dinamika politik lokal atau mendorong siswa untuk merefleksikan peran mereka sebagai warga negara dalam konteks Kabupaten Karangasem. Akibatnya, pelajar sering kali memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dan elitis, bukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat mereka pengaruhi. Di sisi lain, terdapat potensi besar yang bisa dimanfaatkan. Kabupaten Karangasem memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat dengan nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal, yang bisa diintegrasikan dalam kurikulum PKn, dapat menjadi *entry point* untuk menumbuhkan kesadaran politik berbasis kearifan lokal (Yusuf, 2021). Misalnya, tradisi banjar dan musyawarah desa dapat dijadikan bahan ajar kontekstual yang mencerminkan praktik demokrasi langsung di masyarakat. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peran PKn dalam membangun kesadaran politik generasi muda, perlu dilakukan reformasi pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipasi, dan reflektif. PKn harus difungsikan tidak sekadar sebagai mata pelajaran wajib, tetapi sebagai ruang edukatif yang mengasah kepedulian, keberanian menyuarakan pendapat, dan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, dimulai dari lingkungan terdekat mereka.

PKn memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga negara (Putra & Sudiarta, 2023). PKn tidak hanya mengajarkan konsep-konsep dasar kenegaraan, tetapi juga menanamkan kemampuan berpikir kritis, sikap terbuka, dan keterampilan sosial politik yang esensial bagi kehidupan demokratis. Pendidikan ini dapat menjadi sarana strategis untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga aktif dalam kehidupan publik. PKn juga memiliki tanggung jawab untuk membekali siswa dengan literasi digital dan kemampuan memilah informasi politik secara kritis. Mengingat arus informasi yang begitu cepat, sering kali bercampur fakta dan opini, bahkan hoaks politik, maka PKn dapat mengambil peran dalam membentuk warga negara muda yang cerdas bermedia. Dalam konteks Karangasem, di mana penggunaan media sosial dalam pembelajaran PKn dapat menjadi strategi penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya konsumtif terhadap informasi politik, tetapi juga mampu melakukan analisis kritis dan bersikap bijak dalam berekspresi di ruang publik digital.

Keterlibatan aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan pengelola kebijakan pendidikan daerah juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan PKn sebagai instrumen pembangunan kesadaran politik (Setiawati et al., 2023). Guru perlu diberdayakan melalui pelatihan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pengembangan metode pembelajaran yang kontekstual, inovatif, dan berbasis pengalaman siswa. Selain itu, penting juga untuk membangun jejaring kolaborasi antara sekolah dan komunitas lokal. Lembaga adat, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan di Karangasem dapat dilibatkan sebagai narasumber atau mitra dalam pembelajaran PKn. Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya perspektif siswa, tetapi juga memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan masyarakat dalam membentuk warga negara yang berkarakter dan berdaya politik. Dengan mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan yang responsif terhadap konteks lokal dan tantangan zaman, Kabupaten Karangasem memiliki peluang besar untuk mencetak generasi muda yang hanya memiliki kesadaran politik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan partisipatif.

3.3. Tantangan dalam Implementasi PKn

Terdapat beberapa tantangan mendasar dalam implementasi PKn, Dominasi metode ceramah dalam pembelajaran PKn, yang teridentifikasi sebagai salah satu tantangan mendasar, bukan sekadar pilihan metodologis guru, melainkan merefleksikan beberapa faktor mendalam yang menghambat pembentukan kesadaran politik siswa. Secara intrinsik, metode ceramah cenderung mengandaikan siswa sebagai penerima pasif informasi, mengabaikan prinsip-prinsip konstruktivisme yang menyatakan bahwa pemahaman mendalam terbentuk melalui keterlibatan aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Fenomena ini bisa berakar dari kurikulum yang padat, tekanan untuk menyelesaikan materi ajar, atau kurangnya pelatihan guru dalam metodologi pembelajaran inovatif. Akibatnya, siswa tidak terlatih untuk menganalisis, berdiskusi, atau

merumuskan pendapat secara mandiri, keterampilan esensial bagi warga negara demokratis yang bernalar kritis dan partisipatif.

Di sisi lain, pembelajaran PKn sering kali terlepas dari konteks dan pengalaman siswa sehari-hari karena kurangnya integrasi nilai-nilai demokrasi lokal. Nilai-nilai seperti musyawarah desa, gotong royong, dan partisipasi dalam banjar, yang kaya akan makna demokrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar. Padahal, mengaitkan materi dengan kearifan lokal dapat membuat pembelajaran lebih relevan, bermakna, dan mudah dipahami oleh siswa. Pembelajaran PKn idealnya tidak hanya memberikan pengetahuan tentang konsep politik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan praktis atau simulatif (Nurhayati et al., 2024). Namun, kegiatan seperti diskusi kelas, simulasi sidang DPR, atau kunjungan ke lembaga pemerintahan lokal masih jarang dilakukan. Padahal, kegiatan-kegiatan ini dapat membantu siswa memahami bagaimana proses politik berlangsung dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi di dalamnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap sumber pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta minat siswa. Materi PKn sering kali disajikan dalam bentuk teks yang padat dan kurang visual, sehingga sulit menarik perhatian siswa yang terbiasa dengan media digital. Akibatnya, siswa kurang antusias dalam belajar PKn dan menganggapnya sebagai mata pelajaran yang membosankan. Hal ini juga berdampak kepada guru selaku pengajar sehingga batas kapabilitas pengetahuan materinya juga minimal. Kompetensi guru dalam mengaitkan materi PKn dengan isu-isu aktual menjadi faktor penting dalam efektivitas pembelajaran. Namun, sebagian guru PKn masih menghadapi kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan dinamika politik kontemporer, baik di tingkat nasional maupun lokal. Akibatnya, pembelajaran menjadi tidak kontekstual dan terputus dari realitas yang sedang dihadapi siswa, sehingga kurang relevan dengan kehidupan mereka.

Tantangan lain juga berasal dari faktor evaluasi. Tantangan evaluasi dalam pembelajaran PKn, yang cenderung hanya berfokus pada aspek kognitif melalui tes tertulis, bukan hanya sekadar masalah teknis penilaian, melainkan cerminan dari pemahaman yang belum utuh terhadap tujuan PKn itu sendiri. Fenomena ini muncul karena kurikulum dan praktik pengajaran sering kali lebih menekankan transfer pengetahuan faktual daripada pembentukan sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Akibatnya, guru mungkin merasa tertekan untuk mengukur capaian kognitif demi memenuhi standar kurikulum, sementara aspek afektif seperti kepedulian sosial, serta psikomotorik seperti kemampuan berdialog dan inisiatif berpartisipasi, terabaikan karena dianggap lebih sulit diukur secara kuantitatif. Padahal, aspek-aspek inilah yang sejatinya membentuk esensi kesadaran politik dan karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan evaluasi yang holistik dan komprehensif, tidak hanya melalui tes tertulis tetapi juga observasi partisipasi dalam diskusi, penilaian proyek kolaboratif, atau portofolio yang merefleksikan aksi nyata siswa dalam konteks kewarganegaraan. Pendekatan *authentic assessment* semacam ini, yang melibatkan skenario dunia nyata dan penilaian performa, akan mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih partisipatif, sekaligus memberikan umpan balik yang lebih akurat tentang perkembangan sikap dan keterampilan siswa, sehingga tujuan PKn dalam membentuk warga negara yang utuh dapat tercapai secara efektif.

Penguatan PKn membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dari sekolah dan pemangku kebijakan lokal. Namun, tidak semua sekolah menyediakan ruang atau kegiatan yang mendukung pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti forum OSIS yang demokratis atau kemitraan dengan lembaga demokrasi lokal. Selain itu, kebijakan pendidikan daerah belum sepenuhnya memberikan perhatian pada revitalisasi PKn sebagai media pembangunan politik pelajar (Kurniawan & Saputra, 2020). Pendidikan politik sangat penting ditanamkan dari generasi muda karena citra politik harus dijaga sebagai demokrasi yang bersih. Jangan sampai persepsi negatif terhadap politik di kalangan guru dan siswa sudah menjamur. Pandangan bahwa politik itu kotor, penuh konflik, atau bukan urusan anak sekolah masih cukup kuat, sehingga mempengaruhi atmosfer pembelajaran PKn. Hal ini menyebabkan siswa enggan terlibat dalam diskusi atau refleksi kritis mengenai isu-isu sosial dan politik yang sebenarnya relevan dengan kehidupan mereka.

3.4. Strategi Inovatif Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Lingkup Sekolah Karangasem

Melalui berbagai literatur dari hasil kajian dokumen, ditemukan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas PKn sebagai fondasi kesadaran politik generasi muda. Pembahasan studi kasus dengan penguat deskripsi mengenai implikasi yang lebih jelas dan spesifik bagi pemangku kepentingan terkait, serta rekomendasi kebijakan dan praktik yang didasarkan pada analisis mendalam dan bukti-bukti yang kuat. Berangkat dari lingkup penanaman pendidikan utama dari sekolah, implikasi guru sebagai peran sentral. Guru sekolah memiliki keleluasaan dalam transformasi pendidikan, terutama PKn. Implikasi utama bagi guru adalah perlunya peningkatan kompetensi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan inovatif. Pelatihan intensif dan berkelanjutan tentang metode pembelajaran aktif, integrasi nilai lokal, pemanfaatan teknologi, dan pendidikan politik menjadi krusial. Guru juga perlu didorong untuk

mengembangkan kreativitas dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa, serta membangun kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.

Sekolah sebagai institusi formal memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan kesadaran politik siswa. Implikasi bagi sekolah adalah perlunya penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi pembelajaran PKn yang inovatif, seperti akses internet, perangkat teknologi, dan ruang diskusi yang demokratis. Sekolah juga perlu merevitalisasi organisasi siswa (OSIS) sebagai wahana pelatihan demokrasi internal, serta membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga demokrasi lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik bagi siswa. Menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan politik secara langsung, Penerapan proyek kewarganegaraan (*civic project*) di sekolah sangatlah efektif. Revitalisasi OSIS dan organisasi siswa di sekolah menjadi sangat penting sebagai wahana pelatihan demokrasi internal (Prasetyo et al., 2023). Organisasi intra sekolah perlu difungsikan sebagai miniatur demokrasi dengan sistem pemilihan yang transparan, musyawarah terbuka, serta pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan sekolah. Dengan demikian, siswa mendapatkan pengalaman awal dalam menjalankan praktik demokrasi sehari-hari, belajar tentang kepemimpinan, representasi, dan akuntabilitas.

Peran serta dalam membangun pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menghadapi isu-isu aktual. Hal ini dapat diaplikasikan melalui pengembangan model pembelajaran kontekstual berbasis masalah. Dalam hal ini, siswa diajak untuk menganalisis isu-isu lokal yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti pembangunan pariwisata yang merusak lingkungan atau distribusi bantuan sosial yang tidak merata. Melalui analisis mendalam dan diskusi kritis, siswa belajar untuk mengidentifikasi akar masalah, mencari solusi alternatif, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga mereka terlatih untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Strategi sangat bergantung pada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pendidikan politik. Guru PKn harus dibekali dengan kemampuan untuk mengajarkan politik secara netral, kritis, dan partisipatif, sehingga mereka dapat memfasilitasi diskusi kelas yang dinamis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat, dan membimbing mereka dalam menganalisis informasi politik secara objektif. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman tentang konteks politik lokal Karangasem serta keterampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran (Lestari, 2024).

Pemanfaatan media digital dan teknologi dalam pembelajaran PKn menjadi sebuah transformasi fundamental yang esensial untuk menarik minat siswa dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan gaya hidup digital mereka. Secara analitis, pendekatan ini efektif terletak pada keselarasan intrinsik antara karakteristik media digital yang interaktif, visual, dan berbasis pengalaman dengan karakteristik kognitif dan sosial-emosional generasi muda saat ini. Otak remaja, yang cenderung diprogram untuk stimulasi visual dan interaksi cepat, menemukan pembelajaran pasif kurang menarik. Oleh karena itu, penggunaan video edukatif, *podcast* politik remaja, atau *game* simulasi pemilu bukan hanya menghibur, tetapi secara kognitif memfasilitasi pemrosesan informasi yang lebih efisien dan mendalam. Terdapat stimulasi peningkatan *engagement* dan motivasi untuk memicu rasa ingin tahu dan partisipasi aktif. Ketika siswa terlibat dalam *game* simulasi pemilu, misalnya, mereka tidak hanya mempelajari tahapan pemilu, tetapi juga mengalami konsekuensi dari pilihan mereka, yang jauh lebih berkesan daripada sekadar membaca teks. Integrasi digitalisasi media pembelajaran PKn juga meningkatkan kontekstualisasi dan relevansi sebagai platform diskusi daring yang memungkinkan guru memfasilitasi pembahasan isu politik lokal secara *real-time*. Hal ini menciptakan ruang bagi siswa untuk menghubungkan konsep PKn dengan masalah nyata di lingkungan mereka, seperti pengelolaan sampah atau pembangunan infrastruktur, sehingga materi tidak terasa abstrak. Melalui forum diskusi *online*, siswa tidak hanya belajar berpendapat, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, berargumen secara sehat, menghargai perbedaan pandangan, dan berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan digital. Hal ini merupakan bentuk penciptaan ruang partisipasi demokratis di era modern, yang tidak mudah dikembangkan melalui metode pembelajaran konvensional.

Mengintegrasikan nilai-nilai lokal Karangasem dalam pembelajaran PKn menjadi langkah krusial untuk membuat materi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Nilai-nilai seperti kebersamaan dalam subak, budaya *ngejot*, dan partisipasi dalam *banjar* dapat dihubungkan dengan konsep partisipasi politik dan demokrasi deliberatif, sehingga siswa dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi terwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya menjadi hafalan teori, tetapi juga refleksi atas praktik kehidupan bermasyarakat yang mereka alami. Upaya mengintegrasikan pembelajaran PKn dengan konteks lokal, penyusunan modul PKn berbasis lokalitas Karangasem perlu dilakukan. Pemerintah daerah atau lembaga pendidikan tinggi di Bali dapat berperan dalam menyusun bahan ajar PKn yang mencakup tokoh lokal, sejarah demokrasi desa adat, dan dinamika sosial politik Karangasem. Modul semacam ini akan menjadikan pembelajaran lebih dekat dan bermakna bagi siswa, karena mereka dapat belajar tentang akar budaya politik mereka sendiri dan bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan kehidupan modern (Nanggala, 2020).

Langkah yang harus terus diiringi dalam upaya strategi inovatif di atas adalah memastikan efektivitas implementasi semua strategi di atas, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan PKn secara berkala sangatlah

penting. Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi PKn di sekolah-sekolah, baik dari aspek metode pembelajaran, partisipasi siswa, hingga dampak terhadap perubahan sikap politik siswa (Fauziyah, 2024). Hasil evaluasi ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan kurikulum, pelatihan guru, dan pengembangan strategi pembelajaran ke depannya.

3.5. Strategi Inovatif Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Luar Sekolah Karangasem

Generasi muda juga merupakan bagian masyarakat, maka implikasi berikutnya adalah peran pemerintah setempat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan PKn yang efektif di wilayahnya. Implikasi bagi pemerintah daerah adalah perlunya penyusunan kebijakan pendidikan yang memberikan perhatian khusus pada penguatan PKn, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan guru, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan kurikulum berbasis lokal. Pemerintah daerah juga dapat berperan aktif dalam memfasilitasi kolaborasi antara sekolah, lembaga demokrasi lokal, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem pendidikan politik yang kuat.

Pemerintah daerah bisa menyinergikan dalam kelembagaan masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik generasi muda di Karangasem. Lembaga masyarakat, seperti organisasi kepemudaan, lembaga adat, dan LSM, dapat menjadi mitra penting dalam pembelajaran PKn. Implikasi bagi lembaga masyarakat adalah perlunya keterlibatan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda, baik melalui kegiatan di luar sekolah maupun kolaborasi dengan sekolah dalam pembelajaran formal (Alanur, 2022). Lembaga masyarakat dapat menjadi narasumber, fasilitator, atau mentor dalam kegiatan pembelajaran PKn serta memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan mereka. Di Karangasem, pelibatan lembaga adat dan organisasi kepemudaan dalam pembelajaran PKn dapat memperkaya pemahaman siswa tentang nilai-nilai demokrasi dan partisipasi dari perspektif lokal.

Dalam rangka memperkuat konsep kewarganegaraan yang kontekstual dan relevan dengan pengalaman siswa, bisa dilakukan kerja sama MoU dari pihak lembaga pemerintahan dengan pendidikan. Mengirimkan siswa untuk magang di kantor pemerintah daerah, DPRD, KPU, atau organisasi masyarakat sipil (OMS) akan memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana pelayanan publik diberikan, dan bagaimana OMS berperan dalam advokasi. Pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang politik praktis dan mendorong mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Hal ini juga memberikan peluang integrasi forum warga muda sekaligus. Memfasilitasi pembentukan forum warga muda di tingkat desa atau kecamatan sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi tentang isu-isu lokal, dan merencanakan kegiatan pembangunan. Forum ini dapat menjadi mitra pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan. Generasi muda dalam forum atau siswa magang bisa dilibatkan dalam pengelolaan media sosial seperti kampanye kreatif. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kewarganegaraan secara kreatif dan menarik berdasarkan pantauan Lembaga pemerintahan untuk gerakan positif. Generasi muda dapat dilibatkan dalam pembuatan konten, seperti video pendek, meme, atau infografis, yang mengangkat isu-isu politik lokal atau mempromosikan nilai-nilai demokrasi (Sugara, 2022).

Dalam rangka memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang proses demokrasi, membangun kolaborasi antara sekolah, KPU daerah, dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih pemula adalah langkah yang strategis. Program seperti "*Democracy Goes to School*" dapat menjadi sarana pelatihan politik yang edukatif dan menyenangkan, di mana siswa dapat belajar tentang tahapan pemilu, peran KPU, dan pentingnya partisipasi dalam menentukan pemimpin (Rahmawati & Zukfekar, 2021). Kolaborasi semacam ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis kepada siswa, tetapi juga membangun kesadaran mereka tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini selaras dengan teori kewarganegaraan demokratis, perlunya menekankan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara, termasuk generasi muda dari kalangan siswa untuk berpartisipasi secara efektif. Ini termasuk penyusunan kebijakan pendidikan yang mendukung PKn, alokasi anggaran yang memadai, dan fasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan dalam membangun infrastruktur kewarganegaraan yang kuat.

4. Simpulan

Penelitian ini menggarisbawahi peran strategis PKn dalam membentuk kesadaran politik generasi muda, khususnya di Kabupaten Karangasem, melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran PKn di Karangasem masih bersifat normatif dan kurang mengaitkan materi dengan realitas politik lokal, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik di kalangan pemuda. Tantangan utama yang dihadapi meliputi terbatasnya pendekatan pembelajaran aktif, kurangnya integrasi nilai lokal, minimnya akses terhadap media pembelajaran yang menarik, serta rendahnya pelibatan siswa dalam aktivitas politik simulasional. Sebagai arah solusi, diperlukan strategi penguatan seperti integrasi nilai-nilai lokal ke dalam materi ajar, pengembangan model pembelajaran berbasis masalah, pelatihan

guru dalam pendidikan politik, serta kolaborasi antara sekolah, KPU, dan pemerintah desa. Dengan pendekatan yang reflektif dan berbasis kearifan lokal, PKn dapat berfungsi lebih efektif dalam membangun kesadaran politik sejak dini, yang berkontribusi pada pengembangan generasi muda yang kritis, partisipatif, dan memiliki pemahaman kuat akan peran mereka sebagai warga negara dalam konteks pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kontribusi Penulis

Seluruh tahapan penelitian ini, mulai dari perencanaan, perumusan masalah, kajian pustaka, penyusunan instrumen, pengumpulan dan analisis data, hingga penulisan dan penyuntingan artikel dilakukan sepenuhnya oleh I Wayan Dresti Yasa. Adapun penulis anggota sebagai *conceptualization* dan *data curation*. Seluruh penulis bertanggung jawab atas keaslian, keakuratan, serta integritas keseluruhan isi artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan dari lembaga mana pun. Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ditanggung sepenuhnya oleh penulis secara mandiri.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Daftar Rujukan

- Aminuddin, A., & Yulianti, R. (2021). Penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran politik siswa di era digital. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.21009/jce.051.02>
- Bupati Karangasem. (2023). *Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024*. Karangasem: Pemerintah Kabupaten Karangasem. https://v2.karangasemkab.go.id/assets/ipkd/RKPD%202024_862013.pdf
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. (2024). *Laporan tahunan mutu pendidikan SMA dan SMK Kabupaten Karangasem*. Karangasem: Disdikpora Karangasem. <https://pendidikan.karangasemkab.go.id/2024/>
- Diskominfo Kabupaten Karangasem. (2023). *Sarasehan Pemuda Harkitnas: Waspada! Bahaya Laten PKI*. <https://diskominfo.karangasemkab.go.id/index.php/baca-berita/9/Sarasehan-Pemuda-Harkitnas-Waspada-Bahaya-Laten-PKI>
- Fadillah, R. (2022). Literasi politik digital dalam pembelajaran PKn: Strategi meningkatkan kesadaran kritis siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 98–110. <https://doi.org/10.24832/jpk.v7i3.4356>
- Fauziyah, N. (2024). Peran pendidikan politik di perguruan tinggi bagi mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(2), 134–145. <https://www.researchgate.net/publication/383929606>
- Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. (2021). *Pembinaan karakter dan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal*. Karangasem: Kemenag Karangasem. <https://arsip.kemenagkarangasem.id/arsip/qZCftiv1AHNQJdUHOIG0mGCytPeM47i8JfGzCJ4f.pdf>
- Kurniawan, D., & Saputra, H. (2020). Model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan partisipasi politik siswa. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 4(2), 45–59. <https://doi.org/10.31294/cc.v4i2.3333>
- Lestari, D. S. (2024). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/346497861>
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197–210. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.354>
- Nurhayati, W., et al. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila*. Padang: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. <https://repository.uharajaya.ac.id/31895/1/E%20BOOK%20PPKN%202024.pdf>
- Devi, S., et al. (2024). Pendidikan kewarganegaraan untuk generasi muda. *Jurnal Generasi Negarawan Pamulang*, 5(1), 23–35. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/gnp/article/view/46428>
- Setiawati, I., et al. (2023). Pentingnya pembelajaran PKn di SD untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 89–98. <https://www.researchgate.net/publication/380912874>
- Prasetyo, K. B., et al. (2023). Pendidikan politik generasi muda melalui media sosial. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 3(1), 55–70. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/kp/article/download/48/45/132>
- Labetubun, et al. (2021). *Pendidikan Pancasila*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Pendidikan-Pancasila-BS-KLS-VIII.pdf>
- Universitas Negeri Makassar. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan: Konsep dan pembelajaran*. <https://eprints.unm.ac.id/30141/2/PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN.pdf>

- Putra, I. K. A., & Sudiarta, I. N. (2023). Integrasi kearifan lokal Bali dalam pendidikan kewarganegaraan: Studi kasus di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 12(1), 72–85. <https://doi.org/10.23887/jpsi.v12i1.5230>
- Rahmawati, T., & Zulfikar, A. (2021). Kolaborasi sekolah dan KPU dalam pendidikan pemilih pemula: Studi empiris di sekolah menengah. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan*, 3(2), 130–144. <https://doi.org/10.21411/jdp.v3i2.2021>
- Alanur, S., et al. (2022). Studi budaya politik mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan politik kewarganegaraan. *Jurnal Bimbingan dan Teknologi Informasi*, 8(1), 23–34. <https://jbti.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/139/59/383>
- Sugara, A. (2022). Pendidikan politik lintas generasi dalam membangun partisipasi politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 45–56. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/17605>
- Yusuf, M. (2021). Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *Jurnal Etika Digital*, 3(1), 45–60. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/11721>